



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Jln Trans Papua Km.4, Email : [dpmp2t.bovendigoel@gmail.com](mailto:dpmp2t.bovendigoel@gmail.com) Kode Pos : 99663 Tanah Merah, Telp.



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
( LAKIP OPD )**



**TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kegiatan belanja aparatur dan belanja public Tahun Anggaran 2017 telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel.

Dengan motto “**NUP BAGEN NGGUP BAGENEPE, NGGUP BAGENEPE NUP BAGEN**” (**SAYA ADA KARENA KAMU ADA, KAMU ADA KARENA SAYA ADA**) maka Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah mengajak semua pihak, baik pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam pembangunan manusia dengan orientasi pada pemerataan, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas aparatur pemerintahan sebagai acuan untuk membangun Kabupaten Boven Digoel dengan meningkatkan professional aparat dan kinerja Pelayanan Perizinan dan non Perizinan.

Semua Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Boven Digoel pada Tahun 2017 diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi dan Kabupaten Boven Digoel bukan saja sebagai *wacana* namun benar-benar terwujud secara nyata.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada tim Penyusun Laporan Akhir Tahun Anggaran 2017 serta semua staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel yang telah berupaya membantu dalam penyusunan laporan dalam rangka mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, baik rutin maupun program untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi.

Demikian laporan ini dibuat semoga dapat memberikan gambaran tentang apa yang telah dilakukan dan dapat dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2017, semoga dapat bermanfaat.

Tanah Merah, Januari 2018  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu

**DJUKMARIAN, S.STP**  
**Pembina TK. I**  
**NIP. 19760722 199511 1 002**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	- i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	- ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIVE .....</b>	- iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1 - 1
A. Latar Belakang .....	1 - 1
B. Landasan Hukum .....	1 - 1
C. Gambaran Umum Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	1 - 3
D. Sistematika Penulisan .....	1 - 11
<b>BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOVEN DIGOEL .....</b>	2 - 1
A. Rencana Stratejik .....	2 - 1
B. Strategi Pencapaian.....	2 - 11
C. Rencana Kinerja Tahun 2017 .....	2 - 11
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOVEN DIGOEL .....</b>	3 - 1
A. Kesekretariatan .....	3 - 1
1. Umum dan Kepegawaian.....	3 - 1
2. Perencanaan Program dan Keuangan .....	3 - 3
B. Kinerja Bidang.....	3 - 4
1. Bidang Penanaman Modal.....	3 - 4
2. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.....	3 - 4
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 .....</b>	4 - 1
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	4 - 1
B. Pengukuran Kinerja Kegiatan.....	4 - 1
C. Aspek Keuangan.....	4 - 2
D. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas .....	4 - 2
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	5 - 1
<b>LAMPIRAN .....</b>	-



## IKHTISAR EKSEKUTIVE

Salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel selama Tahun Anggaran 2017 disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2017 sebagai implementasi tugas yang diemban oleh organisasi. Laporan ini selain merupakan suatu kewajiban sebagaimana Inpres No 7 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja pemerintah, juga merupakan salah satu kebutuhan bagi Dinas dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP ini menyajikan berbagai kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2017 yang meliputi kegiatan ke sekretariatan dan kegiatan 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

### A. Maksud dan Tujuan

#### ➤ Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya administrasi hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

#### ➤ Tujuan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta tersedianya Brosur perizinan.
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban di Kabupaten Boven Digoel.
4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat

### B. Sasaran Pokok

- Eksistensi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi yang menangani Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- Terwujudnya aparatur yang kredibel dan berkualitas;
- Peningkatan sarana dan prasarana baik penunjang kantor maupun sarana masyarakat Untuk Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;



### C. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a) Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan yang masih terbatas;
- b) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c) Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi sehingga dapat mempengaruhi citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti;
- d) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan.

### D. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut, adalah:

- a) Menganggarkan secara periodik untuk kegiatan pelatihan formal dan bimbingan teknis kepada aparatur sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam menunjang kinerja;
- b) Menerapkan Teknologi Informasi untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c) Menetapkan Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/ Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Secara geografis luas wilayah Kabupaten Boven Digoel mencapai 27.836,6 Km<sup>2</sup>, Setelah dimekarkan menjadi 20 Distrik, dan Distrik Yaniruma merupakan Distrik yang terluas mencapai 3.255,91 Km<sup>2</sup> (11,70 %) Distrik Jair berada pada posisi kedua dengan luas wilayah 3.005,23 Km<sup>2</sup> (10,80 %). Distrik Inyandit merupakan Distrik dengan luas wilayah paling kecil yaitu mencapai 310,33 Km<sup>2</sup> (1,11%) secara Astronomi Kabupaten Boven Digoel terletak diantara 4°98' - 7°10' Lintang Selatan dan 139°90' - 141° bujur timur sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat serta sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea.

Karakteristik wilayah merupakan datar bergelombang dengan memiliki ketinggian 0 - 100 m sampai dengan di atas 1000 m dari permukaan laut. Jumlah penduduk (data tahun 2012) sebanyak 57.691 jiwa, dengan pembagian 30.724 (laki-laki) dan 26.967 (perempuan), sedangkan jumlah rumah tangga mencapai 16.173. Sehingga rata-rata penduduk per rumah tangga adalah 3 sampai dengan 4 jiwa. Sex ratio sebesar 113,9 yang berarti dari 1014 laki-laki terdapat 100 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 9,78 jiwa per Km<sup>2</sup>.

#### B. LANDASAN HUKUM

Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idil dari RPJP Kabupaten Boven Digoel, sedangkan landasan operasional adalah ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembangunan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... Tahun 2016.... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun ..... Nomor .....);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 - 2021
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017;



- 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5);
  18. Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

### C. GAMBARAN UMUM STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel dan Dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Adapun Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas sebagai berikut :

#### 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas membawahi :
  - ➔ Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
  - ➔ Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal membawahi :
  - ➔ Seksi Promosi
  - ➔ Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu membawahi :
  - ➔ Seksi Pelayanan
  - ➔ Seksi Pemrosesan
  - ➔ Seksi Data, Informasi dan Pengaduan
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

##### a. Kepala Dinas

###### *Tugas Pokok :*

- Memimpin penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

###### *Fungsi :*



- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris Dinas**

*Tugas Pokok :*

- Membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan

*Fungsi :*

- merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- merumuskan pengkoordinasian pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
- merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
- merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**Sub Bagian Program Dan Keuangan**

*Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok :*



- membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas.

*Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Menyelenggarakan Fungi :*

- menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
- melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;
- mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang - undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;



- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok :*

- Membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas.

*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan Fungsi :*

- menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat - surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
- melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat - rapat dinas;
- melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang - undangan;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;
- menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;



- menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;
- pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

### **1.) Bidang Penanaman Modal**

*Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai Tugas Pokok :*

- Membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan promosi, kerjasama penanaman modal dan Pengkajian serta pengendalian usaha guna terwujudnya iklim/peluang investasi yang baik.

*Kepala Bidang Penanaman Modal Menyelenggarakan Fungsi :*

- penyusunan perencanaan program kerja;
- perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
- perumusan pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal;
- penyelenggaraan penyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal;
- penyelenggaraan sistem informasi bidang penanaman modal;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Seksi Promosi**

*Kepala Seksi Promosi mempunyai Tugas Pokok :*

- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan



promosi penanaman modal guna tercapainya target penanaman modal yang telah ditetapkan dan berkembangnya perekonomian daerah.

*Kepala Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi :*

- menyusun rencana rencana kerja;
- menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
- merumuskan dan menyusun materi promosi;
- melaksanakan promosi penanaman modal daerah;
- menyiapkan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi;
- memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah; menyiapkan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi**

*Kepala Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi mempunyai Tugas Pokok :*

- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan promosi penanaman modal guna tercapainya target penanaman modal yang telah ditetapkan dan berkembangnya perekonomian daerah.

*Kepala Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi menyelenggarakan fungsi :*

- menyusun rencana program kerja;
- menyusun dan menyiapkan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
- menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- melaksanakan dan menyiapkan koordinasi penetapan dan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan prioritas tinggi;



- melaksanakan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar;
- melaksanakan pengkajian tentang usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional sesuai dengan kewenangan daerah;
- mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan pelaku dunia usaha dibidang penanaman modal;
- menyiapkan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal;
- menyiapkan rekomendasi ijin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperijinan;
- menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
- menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **2.) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu**

*Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai Tugas Pokok :*

- melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) pelaksanaan perijinan dan nonperijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan Fungsi :*

- penyusunan perencanaan program kerja;
- perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan nonperijinan;
- perumusan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan dan nonperijinan;
- merumuskan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pelayanan dan pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
- perumusan pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan perijinan dan nonperijinan;



- perumusan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Seksi Pelayanan**

*Kepala Seksi Pelayanan mempunyai Tugas Pokok :*

- melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi para penanam modal.

*Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :*

- penyusunan perencanaan program kerja;
- pelaksanaan kebijakan teknis seksi pelayanan perijinan;
- pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perijinan;
- menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pelayanan perijinan dan nonperijinan;
- pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
- pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**Seksi Pemrosesan**

*Kepala Seksi Pemrosesan mempunyai Tugas Pokok :*

- melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, advokasi, supervisi dan konsultasi kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan ijin berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi para penanam modal.

*Kepala Seksi Pemrosesan menyelenggarakan fungsi :*

- penyusunan perencanaan program kerja;
- pelaksanaan kebijakan teknis pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
- pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perijinan dan nonperijinan;
- menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
- pelaksanaan dan fasilitasi pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
- pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



**Seksi Data, Informasi dan Pengaduan**

*Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai Tugas Pokok :*

- melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemberian informasi data perkembangan penanaman modal, pemberian ijin, regulasi dan pengaduan penyimpangan penggunaan ijin penanaman modal guna terwujudnya citra daerah yang kondusif terhadap penanaman modal.

*Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :*

- penyusunan perencanaan program kerja;
- pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data, informasi dan pengaduan;
- pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengolahan data, sistem informasi dan pengaduan;
- pelaksanaan pelayanan penyediaan data dan sistem informasi;
- pelaksanaan pelayanan pengaduan;
- pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dari Laporan Akhir Tahun Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Gambaran Umum Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
  1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel
  2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II Rencana Stratejik Dan Rencana Kinerja**

- A. Rencana Stratejik
- B. Strategi pencapaian



C. Rencana Kinerja Tahun 2017

**BAB III Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel

- A. Keskretariatan
- B. Bidang Teknis

**BAB IV Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017**

- A. Pengukuran Pencapaian Sasaran
- B. Pengukuran Kinerja Kegiatan
- C. Aspek Keuangan
- D. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas
  - 1. Evaluasi
  - 2. Analisis Akuntabilitas

**BAB V Penutup**

**LAMPIRAN**



---

## BAB II

# RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN BOVEN DIGOEL

#### A. Rencana Stratejik

Rencana Stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Stratejik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Boven Digoel dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur pelaksana pada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### A.1 Visi

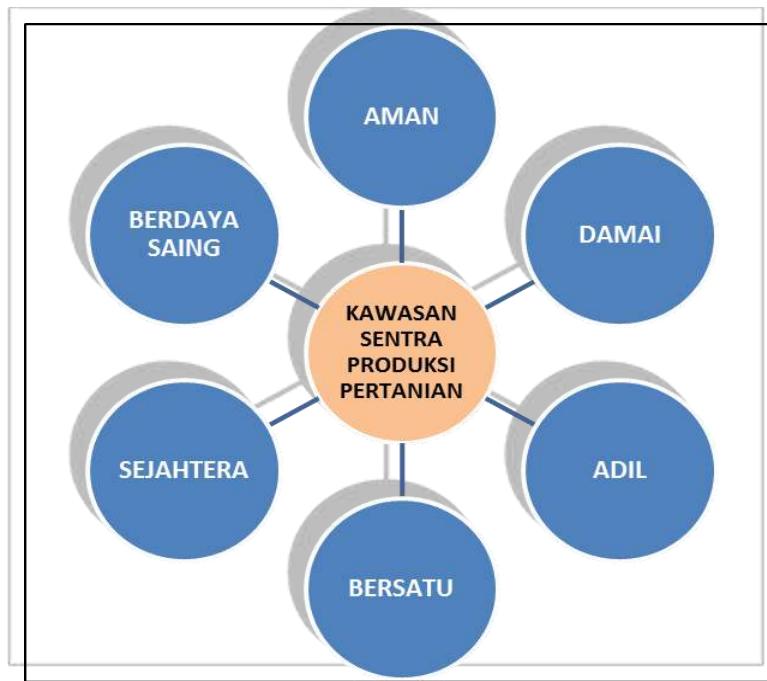
Visi pembangunan memiliki makna penting untuk menyatukan cita dan cipta seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Boven Digoel. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Boven Digoel, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumberdaya tetapi juga pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Kabupaten Boven Digoel diarahkan pada kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh dalam berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Boven Digoel tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Boven Digoel Dengan Tetap Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya”**, maka untuk memajukan Kabupaten Boven Digoel ke depan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman, Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera Dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Visi tersebut mengandung enam elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel sebagai sentra produksi pertanian melalui enam elemen yaitu aman, damai, adil, bersatu, sejahtera, dan berdaya saing. Gambaran dari elemen penunjang Visi terlihat dari gambar tersebut

**Gambar A.1**  
**Elemen Penunjang Visi**



Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

#### A.1.1. Aman

Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan, aspek keamanan sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Untuk membangun wilayah perbatasan yang kokoh, pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus menyediakan pelayanan publik yang memenuhi standar keamanan, komitmen yang kuat, kecukupan anggaran serta sumber daya manusia yang handal agar masyarakat di kawasan perbatasan dapat merasakan langsung pembangunan nasional.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam membangun wilayah perbatasan yang kokoh. Pertama aspek geografi, dimana Kabupaten Boven Digoel masih memiliki potensi wilayah kepulauan yang belum dioptimalkan dengan baik. Aspek kedua, adalah demografis, dimana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di daerah perbatasan. Rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan dapat meningkatkan kriminalitas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus waspada terhadap paham maupun budaya asing yang rentan dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan. Dari sisi keamanan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang baik.

#### A.1.2. Damai

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Namun, masih banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia, permasalahan yang timbul tersebut mengakibatkan banyaknya konflik ataupun kekacauan yang terjadi dimasyarakat.



Perdamaian menjadi keinginan di semua daerah, terutama di daerah perbatasan. Perdamaian di wilayah perbatasan harus menjadi keinginan dan komitmen setiap orang dan seluruh elemen masyarakat. Perdamaian di perbatasan pun harus tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat, demi terciptanya wilayah yang aman tanpa konflik dan hidup dalam persaudaraan dengan berbagai keragaman yang ada.

#### A.1.3. Adil

Masyarakat adil makmur adalah cita-cita bangsa Indonesia, suatu keadaan dimana masyarakat Indonesia telah berhasil mencapai keadilan dan kemakmuran. Semua rakyat tanpa pengecualian mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, rakyat sejahtera, serba kecukupan, serta tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui berbagai macam strategi dan program pemerintah, Boven Digoel diharapkan berupaya melakukan gerakan dan penguatan sumber daya yang dimiliki. Upaya penguatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan selalu digalakkan. Perwujudan pemerataan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lainnya selalu menjadi topik besar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya.

#### A.1.4. Bersatu

Boven Digoel merupakan kabupaten yang memiliki keanekragaman budaya. Keragaman ini sering kali menjadi akar timbulnya konflik antarsuku, ras dan agama. Untuk mengatasi munculnya hambatan, seluruh masyarakat, pihak swasta, dan Pemerintah atau *stakeholder* Kabupaten Boven Digoel harus mengalahkan ego masing-masing, serta bersatu padu untuk meningkatkan kepedulian agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Boven Digoel.

Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengajak masyarakat agar mempererat persatuan untuk membangun daerahnya agar lebih maju dan sejahtera.

#### A.1.5. Sejahtera

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat Kabupaten Boven Digoel, dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan



pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

#### A.1.6. Berdaya Saing

Pembangunan Kabupaten Boven Digoel dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui elemen ini, pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek daya saing.

Daerah yang berdaya saing dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk dapat merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Kabupaten Boven Digoel.

#### A.2 Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

Penjelasan masing-masing dari misi di atas adalah sebagai berikut:

##### A.2.1. Misi pertama: Mengembangkan potensi sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah;

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga negara suatu bangsa khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yg memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa pendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya. Dengan beragamnya ras, etnis, dan agama yang berbeda di Boven Digoel diharapkan pengembangan SDM di Kabupaten Boven Digoel dilakukan lintas etnis, artinya semua etnis bisa memperoleh



pendidikan yang sama di Boven Digoel, serta lintas wilayah, artinya pendidikan merata di semua wilayah Kabupaten Boven Digoel.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Boven Digoel lintas etnis dan lintas wilayah menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini

**A.2.2. Misi kedua; Pengembangan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan;**

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, perlu memerhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat serta sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Boven Digoel ini perlu mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel serta kemampuan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut.

**A.2.3. Misi ketiga; Pengembangan potensi pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani**

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Salah satu tujuan dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat Boven Digoel kebanyakan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasainya, berbasis pada sektor pertanian yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pengembangan potensi pertanian sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi di Boven Digoel dengan segala tantangan yang harus dihadapi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, diharapkan mampu memecahkan persoalan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan membangun ketahanan pangan. Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Maka dari itu, pengembangan potensi pertanian di Boven Digoel juga diikuti dengan memerhatikan kesejahteraan petani.



#### **A.2.4. Misi keempat; Membangun infrastruktur dasar, kawasan khusus serta penataan ruang**

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Boven Digoel diarahkan untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat, terutama pada permukiman-permukiman yang terisolasi. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan hubungan antar tempat sehingga memungkinkan mobilitas faktor produksi, barang dan jasa secara efektif dan efisien. Infrastruktur dalam kerangka pembangunan Kabupaten Boven Digoel sangat penting mengingat kondisi medan yang berat.

Sesuai dengan kondisi medan, moda transportasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang adalah moda transportasi udara dan sungai. Namun demikian, dukungan moda transportasi darat juga sangat dibutuhkan terutama untuk hubungan antar distrik atau antar permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pembangunan ekonomi dalam wilayah dan peningkatan aksesibilitas kegiatan ekonomi ke luar wilayah dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, serta peningkatan layanan pos dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

#### **A.2.5. Misi kelima; Peningkatan stabilitas wilayah kawasan perbatasan**

Indonesia merupakan negara plural yang menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam dan budaya yang berlimpah. Namun, banyak ancaman dan gangguan yang membuat pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia terganggu sehingga dibutuhkan perwujudan wilayah pertahanan negara yang kuat. Upaya pembentukan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang melibatkan elemen rakyat sebagai sistem cadangan kekuatan pertahanan di Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peningkatan pertahanan negara dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Negara Papua Nugini. Daerah pangkal perlawanan merupakan bagian tertentu dari satu ruang atau wilayah pertahanan yang telah dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan atau pusat pengendalian perlawanan terhadap musuh maupun lawan, terutama dalam rangka pelaksanaan perang berlarut.

#### **A.2.6. Misi keenam; Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan prestasi olah raga**

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja



pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Seperti yang telah kita ketahui, wilayah Kabupaten Boven Digoel kaya akan ras dan etnis yang beranekaragam. Pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Boven Digoel diharapkan dilakukan dengan sepenuh hati tanpa membedak-bedakan ras dan etnis. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan pembenahan sistem birokrasi. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara.

#### **A.2.7. Misi ketujuh; Pengembangan pelestarian budaya daerah dan potensi wisata sebagai khasanah nusantara**

Berwisata di era sekarang ini telah menjadi kebutuhan semua orang, terutama bagi orang-orang yang memiliki kesibukan dan butuh berlibur. Kabupaten Boven Digoel sedang mengembangkan potensi wisata melalui pelestarian budaya. Dalam upaya melestarikan keanekaragaman seni dan budaya, pemerintah Boven Digoel dituntut melakukan berbagai upaya guna memperkuat pelestarian seni budaya yang berorientasi pada edukasi dan hiburan. Hingga kini, potensi keanekaragaman budaya khususnya kesenian belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik atau atraksi wisata budaya.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan pariwisata dengan konsep pariwisata budaya. Pemerintah bersama pihak-pihak yang berkepentingan harus mampu menjadikan pariwisata budaya sebagai alat, untuk mendayagunakan sekaligus melestarikan keanekaragaman potensi dan keunikan sumber daya di Indonesia yang salah satunya adalah keanekaragaman seni dan budaya.

#### **A.2.8. Misi kedelapan; Pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui multi bidang pembangunan**

Semua daerah harus berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah,

Kabupaten Boven Digoel mencoba untuk mengembangkan potensi pertanian dan pariwisata sebagai sumber-sumber penerimaan daerahnya. Walaupun Kabupaten Boven Digoel masih tergantung dengan dana dari pemerintah pusat dan hibah, Namun, Kabupaten Boven Digoel berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui bidang-bidang pembangunan lainnya.

#### **A.2.9. Misi kesembilan; Pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki unggulan komparatif lintas pasar**



Kabupaten Boven Digoel menyimpan segudang potensi alam yang menjadi andalan masa depan bangsa Indonesia dan Provinsi Papua. Potensi itulah yang akan menyejahterakan masyarakat yang juga dimiliki hampir sebagian besar wilayah kabupaten/kota lainnya di Papua. Di antaranya letak wilayah yang sangat strategis di atas alur kandungan logam mulia. Selain emas, diperkirakan ada pula nikel, bijih besi, dan batu bara yang terpendam di wilayah kabupaten itu. Pemanfaatan tanah di Boven Digoel oleh masyarakat diantaranya untuk sektor perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan, seperti karet, kopi, cokelat, vanili, dan jambu mete.

Tampaknya, sektor itu dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Komoditas unggulan itu dikembangkan di hampir semua distrik dengan komoditas berbeda-beda. Selain memiliki potensi lahan, sesungguhnya Kabupaten Boven Digoel juga memiliki potensi hutan yang luas. Diharapkan dengan berbagai potensi yang ada, Kabupaten Boven Digoel dapat memanfaatkan potensi tersebut sehingga unggul dengan daerah lainnya.

### A.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Boven Digoel dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan **sasaran** pembangunan pada masing-masing **tujuan** sebagai berikut:

#### A.3.1. Meningkatkan Kualitas SDM

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan, pemerintah bersama masyarakat membangun Kabupaten Boven Digoel dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga mampu berdaya saing di semua aspek kehidupan.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM lintas etnis dan lintas wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka **sasaran** pembangunan yang harus dicapai adalah:



- 
- a) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Angka harapan lama sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah.
  - b) Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.
  - c) Meningkatnya derajat kesehatan, dengan indicator Angka Harapan Hidup.

#### **A.3.2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat**

Kehidupan yang didambakan oleh masyarakat adalah kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan diartikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar. Untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan Kabupaten Boven Digoel berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Boven Digoel bergantung pada pertanian. Peningkatan taraf hidup masyarakat tidak terlepas dari sector agraris karena kebanyakan dari masyarakat bekerja di sektor pertanian.

Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a) Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator Nilai Tukar Petani
- b) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dengan indikator PDRB Sektor Pertanian
- c) Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan indikator Angka Kemiskinan

#### **A.3.3. Meningkatkan Kualitas Keolahragaan**

Hakekat meningkatnya kualitas olahraga adalah upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan peningkatan kualitas keolahragaan didasarkan pada kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui olahraga sebagai kebiasaan dan pola hidup, diharapkan terbentuk masyarakat dengan jasmani yang sehat, bugar, memiliki watak dan kepribadian, disiplin, sportivitas, dan daya tahan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, etos kerja dan prestasi.

Guna meningkatkan kualitas keolahragaan Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: “**Meningkatnya prestasi olahraga**”

#### **A.3.4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Stabilitas Wilayah**

Aksesibilitas adalah konsep yang menghubungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi. Untuk memudahkan pelayanan serta memudahkan distribusi barang dan jasa, maka perlu untuk mengembangkan jaringan jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha. Tanpa sistem transportasi, sarana dan prasarana yang memadai, maka perkembangan suatu daerah akan sulit berkembang. Dalam hal ini, faktor aksesibilitas memegang peranan penting dalam pengembangan suatu wilayah.

Guna meningkatkan aksesibilitas dan stabilitas wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a) Tersedianya aksesibilitas kawasan khusus, dengan indikator Jumlah kawasan khusus yang terakses.
- b) Terciptanya stabilitas wilayah perbatasan, dengan indikator Jumlah kawasan perbatasan yang terakses.



- c) Tersedianya aksesibilitas kawasan khusus perbatasan, dengan indikator panjang jalan kondisi baik di wilayah perbatasan.
- d) Meningkatnya pemukiman masyarakat yang layak huni, dengan indikator persentase rumah yang memiliki akses listrik, persentase rumah yang memiliki akses air bersih, persentase rumah tangga bersanitasi.

#### **A.3.5. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah**

Dinamika perkembangan ekonomi daerah memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing perekonomian. Pemahaman mengenai pentingnya daya saing berkembang seiring dengan semakin berkembangnya globalisasi dan perdagangan bebas. Daya saing secara garis besar diukur berdasarkan kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah.

Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi dan daya saing tinggi berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daya saing tinggi menuntut pemenuhan sarana dan prasarana dasar, diantaranya infrastruktur, kualitas kelembagaan birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan.

Guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan indikator Laju pertumbuhan ekonomi
- b) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, dengan indicator Jumlah kunjungan wisatawan
- c) Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indicator Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan

#### **A.3.6. Menjaga Kelestarian Alam**

Menjaga kelestarian alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab setiap masyarakat. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan.

Guna menjaga kelestarian alam Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator Luas rehabilitasi kawasan kehutanan.

### **B. Strategi Pencapaian**

Untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan diperlukan Strategi Pencapaian, yaitu :

#### 1. Kebijakan

Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel, yaitu :

a. Peningkatan Sarana dan prasarana.

b. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia ( SDM )



- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pelayanan Perizinan, pengelolaan data dan informasi.
  - d. Penyediaan prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi sehingga dapat mempengaruhi citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti.
2. Program dan kegiatan SKPD
- Program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 yaitu :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - e. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
  - g. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

### C. Rencana Kinerja Tahun 2017

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel melaksanakan Program dan Kegiatan wajib untuk Strategi Pencapaian, yaitu :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - A Penyediaan jasa surat menyurat
  - B Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - C Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - D Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - E Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - F Penyediaan alat tulis kantor
  - G Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - H Penyediaan bahan logistik kantor
  - I Penyediaan makanan dan minuman
  - J Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - A Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - B Pengadaan peralatan gedung kantor
  - C Pengadaan meubeleur
  - D Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - A Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
  - B Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - A Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - A Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6 Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - A Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan



- penanaman modal
- 7 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
- A Penyediaan Informasi Layanan Publik
  - B Peninjauan Lapangan Berkaitan dengan Pelayanan Perizinan
  - C Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan Terpadu



**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**A. KESEKRETARIATAN**

**1. Umum dan Kepegawaian**

**a. Umum**

Urusan umum, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan pola klasifikasi kearsipan yaitu penggandaan naskah dinas yang meliputi kegiatan penerimaan surat masuk dan keluar, pengarahan, pencatatan, pengendalian pengetikan pengiriman, penyimpanan arsip sesuai tata cara kearsipan pemerintah. Disamping itu mengurus kelengkapan perjalanan dinas, dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang tenaga.

Selama tahun 2017 kegiatan surat menyurat adalah sebagai berikut :

✓ Surat masuk	250	pucuk
✓ Surat keluar	83	pucuk
✓ Jumlah	333	pucuk

Dari surat masuk dan keluar dapat di rinci menurut kelompok sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Surat masuk dan keluar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017**

NO.	URAIAN	JUMLAH SURAT (PUCUK)		KET
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR	
1	Kesekretariatan Umum & Kepegawaian	220	54	
2	Bidang Teknis dan lain-lain	30	29	
	JUMLAH	250	83	

Sumber : Data Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

**b. Kepegawaian.**

Sampai akhir tahun 2017, seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel berjumlah 31 orang terdiri dari :

Pegawai negeri sipil (PNS)	: 20 orang
Pegawai honorer	: 11 orang
Tenaga harian lepas - tenaga bantu (THL-TB)	: - orang
CPNS	: - orang

-----  
Jumlah 31 orang

**1) Jabatan Struktural dan Eselonisasi**

Jabatan dan eselonisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.Daftar Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017**

NO	ESELON	JUMLAH	TERISI	BELUM TERISI
1	II.b	-	-	1
2	III.a	1	1	-
3	III.b	2	2	-
4	IV.a	7	7	-
<b>Total</b>		10	10	1

Sumber : Data Nominatif Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

### 2) Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan.

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel menurut pangkat/golongan/ruang gaji dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket.
		L	P		
1 u	I/d Juru Muda	-	-	-	-
2 m	II/a Pengatur Muda	-	-	-	-
3 b	II/b Pengatur Muda Tk. I	2	-	2	-
4 e	II/c Pengatur	1	1	2	-
5 r	II/d Pengatur Tk. I	1	2	3	-
6 :	III/a Penata Muda	1	-	1	-
7 D	III/b Penata Muda Tk.I	2	1	3	-
8 :	III/c Penata	2	1	3	-
9 a	III/d Penata Tk. I	3	1	4	-
10 t	IV/a Pembina	1	-	1	-
11 a	IV/b Pembina Tk. I	1	-	1	-
12 N	IV/c Pembina Utama Tk. I	-	-	-	-
13 o	IV/e Pembina Utama	-	-	-	-
m	<b>Jumlah</b>	14	6	20	-

Sumber : Data Nominatif Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

### 3) Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan pegawai negeri sipil menurut tingkat pendidikan sampai akhir tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket.
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	5	4	9	-
3	Diploma Satu (D-1)	-	-	-	-
4	Diploma Tiga (D-3)	-	1	1	-
5	Sarjana (S-1)	6	3	9	-
6	Sarjana (S-2)	1	-	1	-
7	Sarjana (S-3)	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	12	8	20	

Sumber :Data Nominatif Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017



**4) Keadaan Tenaga Pegawai Honorer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel.**

**Tabel 5.**Data Tenaga Pegawai Honorer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

NO	URAIAN	SARJANA		SARJANA MUDA		SLTA		SLTP	SD	JUMLAH TENAGA HONOR
		TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK			
1.	Sekretariat	-	1	-	-	-	1	-	-	2
2.	Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3.	Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu	-	4	-	-	-	2	-	-	6
4.	Cleaning Service	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Total		-	6	-	-	-	4	1	-	11

Sumber :Data Nominatif Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

## 2. Perencanaan Program dan Keuangan

Tugas Pelaporan yang dilaksanakan antara lain :

**a. Laporan Rutin**

- Laporan Tahunan Dinas.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel per tahun
- Laporan insidentil sesuai kebutuhan.
- Membuat Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Boven digoel sesuai Inpres Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).

**b. Laporan realisasi keuangan**

**1) Pendapatan Asli Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang dari rencana pendapatan, sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisir sebesar Rp. 12.572.000,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel. 6 berikut :

**Tabel 6.**Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	RASIO
1	Penerimaan jenis retribusi yang dipungut :	30.000.000	12.572.000	41,91 %
	Retribusi HO dan IMB	30.000.000	12.572.000	
	Total	30.000.000	12.572.000	41.91 %

Sumber : Data laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017



## 2) Alokasi Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.947.533.717,- (Delapan milyar Sembilan ratus empat tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6.770.296.352,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 75,67%. Serapan Anggaran pada umumnya dapat berjalan dan terealisasi dengan cukup baik sesuai kebutuhan belanja pegawai, barang, jasa, dan belanja modal.

## B. KINERJA BIDANG

### 1. Bidang Penanaman Modal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI (%)		KET
			Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>				
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	70.443.000,-	100	83,98	Terlaksana

### 2. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

NO	PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI (%)		KET
			Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana daerah</b>				
	Penyediaan Informasi layanan public 1. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	19.400.000,-	100	100	Terlaksana
	Peninjauan Lapangan berkaitan dengan Pelayanan Perizinan	93.743.000,-	0	0	Tidak Terlaksana
	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan Terpadu 1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2. Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi 3. Pengadaan Electric Genset 4. Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.175.303.800,- 462.700.000,- 500.674.325,- 377.538.110,- 155.000.000,-	100 100 100 100 100	95,65 90,16 99,62 78,04 100	Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana



	5. Pengadaan Personal Komputer 6. Pengadaan Meja Kerja Komputrer ½ Biro 7. Pengadaan Kursi Putar sedang 8. Pengadaan peralatan Cetak 9. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10. Pengadaan Bangunan Gedung Genset 11. Pengadaan Bangunan Menara Air	221.738.400,- 17.579.100,- 15.402.400,- 74.000.000,- 1.108.000.000,- 193.634.200,- 49.037.265,-	100 100 100 100 100 100 100	100 100 100 98,62 99,50 99,41 99,52	Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------



## BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
3. Keuangan;
4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 90 - 100 = Amat baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup baik
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk keempat aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

### **A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN**

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel. Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan serapan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 75,67%. Sehingga secara umum dapat disebutkan bahwa sasaran tersebut dapat dicapai **Cukup Baik**.

### **B. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**

Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Boven Digoel dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan. Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Boven Digoel dilihat dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan berkisar dari 0% -100% dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan **Cukup Baik**.

### **C. ASPEK KEUANGAN**



Anggaran penerimaan dari Retribusi HO dan IMB untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel pada Tahun Anggaran 2017, yaitu :

1. Target pendapatan untuk Tahun 2017 adalah Rp 30.000.000,- dicapai sebesar Rp. 12.260.000,- atau dicapai sebesar 75,06% dari target.

Tabel target dan realisasi pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 :Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017**

No.	Pendapatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
1.	Retribusi HO dan IMB	30.000.000	12.260.000	75,06 %
Jumlah		30.000.000	11.260.000	75,06 %

2. Sedangkan untuk belanja dari anggaran Rp. 8.947.533.717,00 ternyata dana yang digunakan adalah Rp. 6.770.296.352,00 atau menggunakan anggaran 75,67% untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel pada Tahun Anggaran 2017, seperti berikut ini:

**Tabel 3.2 : Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017**

No.	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih / Kurang (Rp)	Rasio
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	3.272.229.917,00	1.628.974.653,00	1.643.255.264,00	49.78%
2	Belanja langsung (BL)	5.675.303.800,00	5.141.321.699,00	533.982.101,00	90.59%
Jumlah		8.947.533.717,00	6.770.296.352,00	2.177.237.365,00	75.67%

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa, serapan anggaran total sebesar 75.67% berdasarkan pelaksanaan kegiatan berbanding anggaran yang digunakan untuk Tahun 2017 ini disebut **efektif dan efisien**.

#### **D. EVALUASI dan ANALISIS AKUNTABILITAS**

##### **1. Evaluasi**

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan Program Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017 dikategorikan berhasil dengan **cukup baik**.

## 2. Analisis Akuntabilitas

Dengan menggunakan cara perhitungan analisis efektifitas dan efisiensi, hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4 Tabel Analisis Akuntabilitas Tahun 2017**

No	Program dan Kegiatan		Efektifitas	Efisiensi
1	2	3	4	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	a Penyediaan jasa surat menyurat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	c Penyediaan jasa administrasi keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d Penyediaan jasa kebersihan kantor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	f Penyediaan alat tulis kantor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	h Penyediaan bahan logistik kantor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	i Penyediaan makanan dan minuman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	a Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b Pengadaan peralatan gedung kantor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	c Pengadaan mebeleur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	d Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Program peningkatan disiplin aparatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	b Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	a BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	a Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



No	Program dan Kegiatan		Efektifitas	Efisiensi
1	2		3	4
7	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	a Penyediaan Informasi Layanan Publik		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	b Peninjauan lapangan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	c Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan terpadu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 dilaksanakan 100% atau efektif dan efisien kecuali kegiatan peninjauan lapangan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, Hal ini disebabkan karena belum terkoordinirnya team teknis pelayanan perizinan yang dibentuk. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa hampir semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel dapat dilaksanakan dengan baik.



## BAB V PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel memiliki Tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik serta berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi seoptimal mungkin. Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel secara umum dapat dikatakan cukup berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan cukup baik. Pernyataan tersebut didukung oleh penyerapan anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel menggunakan anggaran sebesar Rp. 8.947.533.717,-, dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6.770.296.352,- atau sebesar 75,67%. Pencapaian yang kurang baik terjadi pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk BTL Alokasi dananya sebesar Rp. 3.272.229.917,- hanya diserap sebesar Rp. 1.628.974.653,- atau sebesar 49,78% sedangkan Untuk PAD Target sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.572.000,- atau sebesar 41,91%. Hal ini disebabkan karena Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu merupakan OPD Baru sehingga RKA yang dibuat untuk BTL dan Target PAD masih dalam bentuk estimasi/perkiraan. Serapan Anggaran pada umumnya dapat berjalan dan terealisasi dengan cukup baik sesuai kebutuhan belanja pegawai, barang, jasa, dan belanja modal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Tanah Merah, Januari 2018  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu

**DJUKMARIAN, S.STP**  
**Pembina TK. I**  
**NIP.19760722 199511 1 002**